

# Skala Prioritas Kewenangan Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Daerah Pada Sektor Perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Larmin Suleman Pagalu, Marwan Marwan, Nur Insani  
Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Corresponding Email: [larminsulemanpagalu@gmail.com](mailto:larminsulemanpagalu@gmail.com)

## Abstract

The fisheries sector represents a key potential in South Bolaang Mongondow Regency, but its utilization has not been optimal due to a lack of coordination and cooperation between regions. This study aims to examine the priority scale of authority in regional regulations related to regional cooperation and their impact on the fisheries sector. Using a qualitative approach through document analysis and interviews, the results indicate that priorities should include interregional cooperation, infrastructure development, fisherman capacity building, and ecosystem protection. Effective implementation requires a systematic approach through communication forums, outreach, institutional strengthening, monitoring, evaluation, and budget support.

**Keywords:** Regional Regulation; Regional Cooperation; Fisheries Sector

**Publish Date:** 02 Agustus 2025

## Pendahuluan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Dengan luas wilayah perairan yang mencapai 2.000 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 300 km, sektor perikanan di daerah ini menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian lokal. Namun, pengelolaan yang tidak optimal serta minimnya kerja sama antar daerah menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji skala prioritas kewenangan peraturan daerah mengenai kerja sama daerah dalam sektor perikanan, agar dapat menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi kerja sama daerah dalam pengelolaan perikanan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik di masa depan.<sup>1</sup> Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan

kerja sama daerah di sektor perikanan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Banyaknya aturan yang tumpang tindih dan kurangnya pemahaman tentang kewenangan masing-masing pihak menjadi hambatan dalam implementasi kerja sama. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antar daerah juga seringkali menyebabkan konflik yang merugikan semua pihak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Manado, sekitar 40% dari responden mengaku tidak memahami peraturan yang ada terkait kerja sama daerah dalam sektor perikanan.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan tentang peraturan daerah perlu ditingkatkan agar semua pihak dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Sektor perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan potensi

<sup>1</sup>Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (2022). Laporan Tahunan Sektor Perikanan

<sup>2</sup>Sari, R. (2023). Penelitian tentang Pemahaman Peraturan Kerja Sama Daerah. Universitas Negeri Manado.

sumber daya alam yang melimpah, daerah ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. Namun, pengelolaan yang efektif dan kolaborasi antar daerah menjadi sangat penting untuk memaksimalkan potensi tersebut. Dalam konteks ini, peraturan daerah yang mengatur kerja sama daerah menjadi krusial. Peraturan ini tidak hanya mengatur aspek legal, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Menurut data dari Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sektor perikanan menyumbang sekitar 20% dari total pendapatan daerah, sehingga penguatan regulasi dan kerjasama antar daerah menjadi prioritas utama.<sup>3</sup>

Kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait, seperti nelayan, pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang tidak terintegrasi, sehingga potensi perikanan yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai contoh, data dari Dinas Perikanan Kabupaten menunjukkan bahwa produksi ikan mengalami penurunan sebesar 15% dalam lima tahun terakhir, yang disebabkan oleh kurangnya dukungan kebijakan yang memadai dan kerjasama antar daerah yang lemah.<sup>4</sup> Selain itu, adanya peraturan daerah yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai pentingnya kerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>5</sup>

Meskipun potensi sektor perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangat besar, terdapat beberapa permasalahan yang menghambat

pengembangan kerja sama daerah. Pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Banyak pemerintah daerah yang masih berfokus pada pengelolaan sumber daya di wilayahnya masing-masing tanpa mempertimbangkan dampak dan manfaat dari kolaborasi. Kedua, adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengaturan perikanan yang seringkali menyebabkan kebingungan dalam implementasi kebijakan.<sup>6</sup> Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait perikanan, yang mengakibatkan kebijakan yang diambil tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini diperparah dengan kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai kondisi sumber daya perikanan, sehingga pengambilan keputusan menjadi tidak berbasis bukti.<sup>7</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen.<sup>8</sup> Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, nelayan, dan akademisi. Selain itu, analisis dokumen peraturan daerah yang ada juga dilakukan untuk memahami konteks dan implementasi regulasi yang berlaku. Dalam proses pengumpulan data, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Penelitian ini juga melibatkan analisis statistik dari data sekunder yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan instansi terkait lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sektor perikanan di

<sup>3</sup>Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (2022). Laporan Tahunan Dinas Perikanan.

<sup>4</sup>Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (2021). Data Produksi Perikanan.

<sup>5</sup>Widiastuti, R. (2020). *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Jurnal Ilmu Perikanan, 15(2), 45-60.

<sup>6</sup>Sari, N. (2021). "Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan". Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 123-135

<sup>7</sup>Mulyadi, R. (2020). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan". Jurnal Perikanan dan Kelautan, 15(1), 45-56

<sup>8</sup>Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.<sup>9</sup> Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang skala prioritas kewenangan peraturan daerah dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya

### **Analisis dan Pembahasan Kewenangan Peraturan Daerah Dalam Sektor Perikanan**

Peraturan daerah (Perda) memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan dan pengelolaan sektor perikanan di daerah, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, termasuk sektor perikanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup. Kewenangan ini diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya alam yang ada di wilayahnya, termasuk perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola potensi daerahnya, yang mencakup pengelolaan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya perikanan.<sup>10</sup>

Data dari Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa potensi sumber daya perikanan di daerah ini sangat besar, dengan luas wilayah perairan mencapai 1.200 km<sup>2</sup> yang terdiri dari laut dan perairan darat. Namun, pengelolaan yang tidak optimal dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya perikanan. Oleh

karena itu, Peraturan daerah yang mengatur pengelolaan perikanan harus disusun dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa legislasi daerah harus mampu menjawab tantangan lokal dan mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, analisis terhadap kewenangan Perda dalam sektor perikanan juga mencakup aspek pengawasan dan penegakan hukum. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Misalnya, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal agar tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut penelitian yang pernah dilakukan, efektivitas pengawasan sangat tergantung pada sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah daerah.<sup>12</sup> Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam hal penegakan hukum menjadi sangat krusial.

Selain itu, peraturan daerah juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan Peraturan daerah akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya yang ada. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>13</sup>

Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan pengelolaan perikanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui Peraturan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan ruang

<sup>9</sup>Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

<sup>10</sup>Hidayat, A. (2015). Peraturan Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta: Penerbit XYZ

<sup>11</sup>Suharto, A. (2019). Peran Legislasi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jurnal Hukum Lingkungan, 12(3), 45-58

<sup>12</sup>Rahman, F. (2020). Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 15(1), 32-40

<sup>13</sup>Tjandra, Y. (2021). Good Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 75-89.

bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan tersebut.<sup>14</sup> Tantangan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kedepannya dalam pengelolaan perikanan sangat beragam, mulai dari masalah pencemaran laut hingga eksploitasi yang berlebihan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan Peraturan daerah yang tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa peraturan yang baik harus mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.<sup>15</sup> Dengan demikian, analisis kewenangan Peraturan daerah dalam sektor perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan perikanan di daerah ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

### Skala Prioritas Kewenangan Peraturan Daerah

Dalam merumuskan skala prioritas kewenangan Peraturan daerah tentang kerja sama daerah pada sektor perikanan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan perikanan. Salah satu faktor utama adalah kebutuhan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% penduduk Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan terlibat dalam kegiatan perikanan, baik sebagai nelayan maupun dalam sektor pendukung seperti pengolahan hasil perikanan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>16</sup> Salah satu prioritas utama adalah penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kerjasama ini penting mengingat perairan yang menjadi habitat ikan sering kali melintasi batas administratif daerah. Sebagai contoh, kerjasama dengan daerah tetangga dalam pengelolaan kawasan perikanan yang berkelanjutan dapat meningkatkan hasil tangkapan dan mengurangi konflik antar nelayan.<sup>17</sup>

Selain itu, prioritas kedua adalah pengembangan infrastruktur perikanan yang memadai. Infrastruktur seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pengolahan ikan sangat penting untuk mendukung aktivitas perikanan. Data menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur ini mengakibatkan banyak hasil tangkapan yang tidak dapat dipasarkan dengan baik, sehingga mengurangi pendapatan nelayan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, Peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan infrastruktur perikanan harus menjadi salah satu skala prioritas.

Prioritas lainnya adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan nelayan. Program pelatihan dan penyuluhan yang diatur dalam Peraturan daerah dapat membantu nelayan untuk mengadopsi teknik penangkapan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapan hingga 30% dalam waktu satu tahun.<sup>19</sup> Dengan demikian, pengaturan tentang pelatihan nelayan harus menjadi salah satu fokus dalam Peraturan daerah. Dengan

<sup>14</sup>Mulyana, R. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: Penerbit ABC.

<sup>15</sup>Hadi, S. (2020). *Integrasi Kepentingan dalam Kebijakan Perikanan Berkelanjutan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(4), 102-115.

<sup>16</sup>Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (2022). *Laporan Tahunan Sektor Perikanan*

<sup>17</sup>Rizal, F. (2021). *Kerjasama Antar Daerah dalam Pengelolaan Perikanan*. Makalah Seminar Nasional

<sup>18</sup>BPS. (2022). *Statistik Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. Badan Pusat Statistik.

<sup>19</sup>Prasetyo, D. (2020). *Peningkatan Keterampilan Nelayan Melalui Pelatihan*. *Jurnal Perikanan*, 15(1), 78-89.

memberikan pelatihan yang memadai, nelayan akan lebih siap menghadapi tantangan yang ada, seperti perubahan iklim dan penurunan populasi ikan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan nelayan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih rendah<sup>20</sup>, sehingga peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli yang mengungkapkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.<sup>21</sup>

Skala prioritas kewenangan Peraturan daerah juga harus mempertimbangkan potensi sumber daya perikanan yang ada. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dikenal dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, sehingga pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan nelayan hingga 30% dalam jangka panjang.<sup>22</sup> Oleh karena itu, salah satu prioritas utama dalam Peraturan daerah adalah pengembangan kebijakan yang mendukung praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk menetapkan prioritas dalam hal kerja sama daerah, baik antar daerah maupun dengan pihak swasta. Kerja sama ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penelitian dan pengembangan teknologi perikanan hingga pemasaran produk perikanan. Dengan menjalin kemitraan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk perikanan lokal di pasar nasional maupun internasional. kerja sama yang baik antar daerah dapat menciptakan sinergi yang positif dalam pengelolaan sumber daya

perikanan.<sup>23</sup> Selanjutnya, perlindungan terhadap ekosistem perairan juga harus menjadi prioritas dalam penetapan kewenangan Peraturan daerah.

Pengaturan tentang zona larangan tangkap dan perlindungan terhadap spesies ikan yang terancam punah perlu diatur secara jelas dalam Peraturan daerah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.<sup>24</sup> Dengan demikian, skala prioritas kewenangan Peraturan daerah dalam sektor perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus mencakup kerjasama antar daerah dan berbagai pihak swasta, pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan, dan perlindungan ekosistem. Prioritas ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam strategi Implementasi Peraturan daerah tentang kerja sama daerah dalam sektor perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memerlukan strategi yang jelas dan terukur. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi Perda kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nelayan, pemerintah desa, dan masyarakat umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Sosialisasi yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan perikanan hingga 50%.<sup>25</sup> Sosialisasi Peraturan daerah kepada masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Banyak nelayan yang belum memahami isi dari Peraturan daerah yang ada, sehingga sosialisasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa mereka dapat mematuhi peraturan

<sup>20</sup>Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Perikanan Indonesia

<sup>21</sup>Prasetyo, A. (2019). Pendidikan dan Pelatihan Nelayan: Strategi Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 7(3), 90-105

<sup>22</sup>Santoso, R. (2021). *Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Dampaknya terhadap Pendapatan Nelayan*. *Jurnal Ekonomi Perikanan*, 10(2), 123-135.

<sup>23</sup>Haryono, B. (2020). *Kerja Sama Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 5(1), 50-65.

<sup>24</sup>Suhendra, T. (2018). *Perlindungan Ekosistem Perairan untuk Keberlanjutan Perikanan*. *Jurnal Ekologi*, 12(3), 100-112.

<sup>25</sup>Nasution, R. (2021). *Sosialisasi Peraturan Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 112-125.

yang ditetapkan. Melalui program sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kerja sama dalam pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>26</sup>

Implementasi Peraturan daerah tentang kerja sama daerah dalam sektor perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga memerlukan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah pembentukan forum komunikasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk nelayan, pengusaha perikanan, dan lembaga swadaya masyarakat. Forum ini dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan perikanan dan merumuskan solusi bersama.<sup>27</sup>

Selanjutnya, perlu adanya penguatan kelembagaan untuk mendukung implementasi Peraturan daerah. Kelembagaan yang kuat akan memudahkan koordinasi antar instansi pemerintah dan pihak terkait dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Kelembagaan yang efektif menunjukkan bahwa dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan daerah. Keberhasilan implementasi Peraturan daerah sangat bergantung pada dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kerja sama yang baik antara semua pemangku kepentingan akan menciptakan sinergi yang positif dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kolaborasi antar pihak merupakan kunci keberhasilan dalam

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>29</sup>

Dalam implementasinya, evaluasi secara berkala juga sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Peraturan daerah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan lembaga penelitian, untuk memberikan analisis yang objektif tentang dampak dari Peraturan daerah tersebut.<sup>30</sup> Selain itu, dukungan anggaran dari pemerintah daerah juga menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi Peraturan daerah. Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, berbagai program yang direncanakan dalam Peraturan daerah tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran yang tepat untuk sektor perikanan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah.<sup>31</sup>

Dengan demikian, implementasi Peraturan daerah tentang kerja sama daerah dalam sektor perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi, sosialisasi yang efektif, evaluasi berkala, dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan di daerah ini.

### Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan dalam rangka meningkatkan pengelolaan sektor perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, skala prioritas kewenangan Peraturan Daerah tentang kerja sama daerah harus dirumuskan dengan cermat. Kewenangan Peraturan daerah yang jelas dan terarah akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya perikanan secara

<sup>26</sup>Yusuf, H. (2022). Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 150-160.

<sup>27</sup>Kusnadi, E. (2021). Forum Komunikasi dalam Pengelolaan Perikanan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 200-210.

<sup>28</sup>Setiawan, D. (2020). Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. *Jurnal Kebijakan Sumber Daya Alam*, 14(2), 78-90.

<sup>29</sup>Mardiana, L. (2020). Kolaborasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(4), 200-215.

<sup>30</sup>Wahyudi, S. (2020). Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah dalam Sektor Perikanan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 7(1), 30-40.

<sup>31</sup>Dewi, N. (2021). Dukungan Anggaran untuk Sektor Perikanan. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(3), 45-55.

berkelanjutan. Skala prioritas dalam penetapan kewenangan Peraturan daerah harus mencakup kerjasama antar daerah, pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan, dan perlindungan ekosistem. Implementasi Perda memerlukan pendekatan yang sistematis melalui pembentukan forum komunikasi, sosialisasi, penguatan kelembagaan, monitoring dan evaluasi yang efektif, dan dukungan anggaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan

### Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Perikanan Indonesia
- Badan Pusat Statistik.. (2022). Statistik Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Badan Pusat Statistik.
- Dewi, N. (2021). Dukungan Anggaran untuk Sektor Perikanan. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 8(3), 45-55.
- Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (2021). Data Produksi Perikanan.
- Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (2022). Laporan Tahunan Sektor Perikanan
- Hadi, S. (2020). Integrasi Kepentingan dalam Kebijakan Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(4), 102-115.
- Haryono, B. (2020). Kerja Sama Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. *Jurnal Kebijakan Daerah*, 5(1), 50-65.
- Hidayat, A. (2015). *Peraturan Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit XYZ
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Kusnadi, E. (2021). Forum Komunikasi dalam Pengelolaan Perikanan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(4), 200-210.
- Mardiana, L. (2020). Kolaborasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Teori dan Praktik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(4), 200-215.
- Mulyadi, R. (2020). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan". *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 15(1), 45-56
- Mulyana, R. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: Penerbit ABC.
- Nasution, R. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 112-125.
- Prasetyo, A. (2019). Pendidikan dan Pelatihan Nelayan: Strategi Peningkatan Kesejahteraan. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 7(3), 90-105
- Prasetyo, D. (2020). Peningkatan Keterampilan Nelayan Melalui Pelatihan. *Jurnal Perikanan*, 15(1), 78-89.
- Rahman, F. (2020). Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 15(1), 32-40
- Rizal, F. (2021). Kerjasama Antar Daerah dalam Pengelolaan Perikanan. *Makalah Seminar Nasional*
- Santoso, R. (2021). Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan Dampaknya terhadap Pendapatan Nelayan. *Jurnal Ekonomi Perikanan*, 10(2), 123-135.
- Sari, N. (2021). "Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 123-135
- Sari, R. (2023). Penelitian tentang Pemahaman Peraturan Kerja Sama Daerah. Universitas Negeri Manado.
- Setiawan, D. (2020). Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. *Jurnal Kebijakan Sumber Daya Alam*, 14(2), 78-90.

- Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Suharto, A. (2019). Peran Legislasi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 12(3), 45-58
- Suhendra, T. (2018). Perlindungan Ekosistem Perairan untuk Keberlanjutan Perikanan. *Jurnal Ekologi*, 12(3), 100-112.
- Tjandra, Y. (2021). Good Governance dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 75-89.
- Wahyudi, S. (2020). Evaluasi Efektivitas Peraturan Daerah dalam Sektor Perikanan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 7(1), 30-40.
- Widiastuti, R. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. *Jurnal Ilmu Perikanan*, 15(2), 45-60.
- Yusuf, H. (2022). Sosialisasi Peraturan Daerah kepada Masyarakat Nelayan. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 150-160.